

PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK BERBASIS MULTIKULTURAL PADA MAHASISWA DI IKIP PGRI PONTIANAK

Moad¹, Syafrial Nur², Sitti Uswatun Hasanah³

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIPPS IKIP PGRI Pontianak
Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855
e-mail: moad_54@yahoo.com¹⁾ syafrialnur2018@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendidikan Resolusi Konflik Berbasis Multikultural Pada Mahasiswa Di IKIP PGRI Pontianak. Konflik sosial dimaknai sebagai suatu fenomena alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sosial dan konflik sebagai bentuk interaksi sosial yang menjadi simbol perbedaan kepentingan. Pendidikan multikultural di perguruan tinggi dirancang secara sistematis dengan menitikberatkan pada perspektif pluralitas masyarakat. Perguruan Tinggi sebagai sistem dan tatanan sosial yang kondusif terhadap perkembangan dan ilmu pengetahuan, termasuk juga menjadi pusat perkembangan pandangan positif untuk mendukung proses pendidikan resolusi konflik dengan menggali nilai budaya dan pluralisme masyarakat. Melalui pengalaman belajar yang bermakna dari pengalaman kehidupan nyata mahasiswa dan juga dapat mengembangkan *self-concept* mahasiswa. Sehingga mahasiswa memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesadaran dan sikap, serta kemampuan untuk meresolusi konflik secara positif dan konstruktif dengan tidak melakukan aksi destruktif.

Kata Kunci: Pendidikan resolusi konflik, multicultural, mahasiswa

Abstract

The aim of the study was to find out Multicultural-Based Conflict Resolution Education for Students at IKIP PGRI Pontianak. Social conflict is interpreted as a natural phenomenon and often occurs in social life and conflict as a form of social interaction which is a symbol of different interests. Multicultural education in tertiary institutions is systematically designed with an emphasis on the perspective of the plurality of society. Higher Education as a system and social order that is conducive to development and knowledge, is also a center for the development of a positive outlook to support the conflict resolution educational process by exploring cultural values and societal pluralism. Through meaningful learning experiences from students' real-life experiences and also being able to develop student self-concepts. So that students have the skills and knowledge, awareness and attitudes, as well as the ability to resolve conflicts positively and constructively by not taking destructive actions.

Keywords: Conflict Resolution Education, Multicultural, Students

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan dan konflik sosial kini semakin marak terjadi yang dilakukan oleh oknum maupun komunitas masyarakat terhadap seseorang maupun kelompok tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyikapi konflik secara konstruktif dan penyelesaian konflik dengan akal sehat dan intelektual (Al-Arifin, 2012). Fenomen ini kekerasan yang dilakukan dalam penyelesaian konflik ini merupakan indikasi adanya kesalahan dengan proses pendidikan formal dan dimasyarakat dalam memandang dan menyikapi konflik yang selalu dimaknai negatif (Hanum, 2013). Kesalahan tersebut terjadi pada proses pendidikan yang kurang mampu mengajarkan sikap tolesansi dan sikap saling menghargai dalam perbedaan dari masing-masing individu. Secara psikologis, sikap toleran dan saling menghargai merupakan bagian

dari kecerdasan interpersonal yang dimiliki seseorang. Banyaknya kejadian di masyarakat terkait dengan penyelesaian konflik dengan tindak kekerasan membuat para pendidik harus benar-benar mampu mencari solusi terutama dalam pendidikan formal. Berdialog secara langsung dengan melibatkan orang yang berselisih merupakan cara yang efektif dan sangat demokratis dalam upaya penyelesaian konflik (Ni Putu Indra Rusminiati, 2014)

Secara sosiologis, lingkungan juga dapat mempengaruhi tingkat kepekaan seseorang pada konflik sosial. Keberagaman budaya, ras, etnis, suku, bahasa, agama, gender dan lain sebagainya (Capuzzi, 1997), (Rahmad Hidayat, 2020) yang menciptakan masyarakat multikultural. Kondisi masyarakat yang beragam menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Keberagaman karakteristik masyarakat merupakan isu yang banyak diperbincangkan. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang multikultural yang didukung teknologi informasi yang semakin berkembang dengan pesat.

Proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan lokal perlu diterapkan dalam Pendidikan formal. Pembudayaan dapat dimulai dari sekolah, mengingat sekolah memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran Pradipto (2005), (Rahmad Hidayat, 2020). Dalam konteks ini, pembelajaran diharapkan lebih menekankan pada penanaman moral dan sikap yang berorientasi pada kecerdasan berfikir dalam menanggapi isu permasalahan sosial dengan pendekatan multikultural yang dapat terformulasi dalam kegiatan kurikuler di pendidikan formal yang termuat dalam kurikulum, regulasi lembaga pendidikan dan metode pembelajaran pada satuan pendidikan.

Pembahasan keberagaman karakteristik peserta didik menjadi bagian dari pendidikan yang dilaksanakan secara formal. Pada prosesnya, pendidikan yang terjadi dikelas menyajikan strategi untuk mendidik siswa dengan berbagai karakteristiknya. Secara spesifik, pendidik baik guru maupun dosen perlu menemukan metode pembelajaran untuk menjadikan kelas menjadi kondusif dalam mengakomodir keberagaman peserta didik. Berbagai variasi tersebut perlu dipertimbangkan dalam proses pendidikan terhadap peserta didik (Santrock, 2014). Karena pada dasarnya semua subjek dalam pendidikan adalah kesatuan dari keberagaman latar belakang, adat istiadat, budaya, etnis, dan nilai-nilai. Pendidikan formal mengorganisasikan peserta didik menjadi kelas-kelas dengan tingkatan

tertentu dan terikat pada kurikulum yang berlaku (Joesoef, 1992). Dengan kata lain, sekolah dan perguruan tinggi menjadi tempat yang secara formal terselenggaranya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural tidak hanya mencakup fakta budaya yang berbeda-beda, tetapi juga terkait bagaimana proses menerima, menghargai, mengapresiasi dan mengungkapkan perbedaan-perbedaan tersebut tanpa terpengaruh latar belakang etnis, ras, agama, gender, dsb. (Shen, 2019).

Pendidikan multikultural perlu mendapat perhatian, khususnya pendidikan formal diatur melalui kurikulum yang merupakan bagian dari kebijakan pendidikan (Hoon, 2014). Pendidikan resolusi konflik dengan pendekatan multikultural lebih menekankan pada masalah sosial budaya yang terdapat dimasyarakat dan lingkungannya sehingga mejadi kajian yang sangat relevan dengan kebutuhan peserta didik di perguruan tinggi, sehingga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan sosial budaya beserta pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan manusia dimasa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis empiris terhadap fenomena yang disajikan secara deskriptif, menyeluruh dan induktif agar dapat memahami fenomena besar secara spesifik dan terfokus pada aspek tertentu. Subjek penelitian meliputi dosen dan mahasiswa pada program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) IKIP PGRI Pontianak yang berada pada semester VI (enam). Teknik wawancara, observasi langsung serta analisis dokumen menjadi teknik utama untuk menemukan dan mempelajari permasalahan. Untuk mempermudah proses analisis data dan konsep, peneliti mengadopsi proses analisis data yang dipaparkan oleh (Miles, 2014) mencakup reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Menyikapi Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultur

Bangsa Indonesia hadir dari sifat pluralistik dengan mengakui keanekaragaman suku (etnis), budaya dan tata nilai didalamnya, bahasa dan perbedaan agama dan keyakinan. Setiap suku memiliki kebudayaan, adat istiadat serta bahasa khas (Wilhelm, 1998). Keanekaragaman dan perbedaan dalam etnis, suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat,

dan agama di Indonesia seperti mozaik yang indah yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Namun jika keanekaragaman dan perbedaan tersebut tidak mampu dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sebuah potensi untuk memicu terjadinya konflik budaya dan konflik sosial, yang pada akhirnya mengancam terjadinya disintegrasi pada bangsa Indonesia. Kekebragaman atau multikulturalisme yang berkembang di masyarakat memperkuat Indonesia sebagai bangsa yang pluralisme dalam berbangsa dengan adanya kemampuan mengelola potensi keberagaman (Unwanullah, 2012). Apabila potensi keragaman dan perbedaan tidak mampu dikelola dengan baik, menjadi faktor kuat terjadinya konflik budaya dan konflik sosial, yang pada akhirnya mengancam terjadinya disintegrasi pada bangsa Indonesia.

Secara mendasar konflik dipandang sebagai suatu yang alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sosial manusia. Maka dari itu, Praktek pendidikan multikultural di Indonesia hakikatnya merupakan srategi untuk membantu mempersatukan perbedaan suku, ras dan golongan secara terencana dan sistematis dengan menitikberatkan pada perspektif pluralitas yang ada dalam masyarakat (Gollnick, 2017). Meskipun demikian praktik sosial yang terjadi dimasyarakat tetapsaja menjadi faktor kuat timbulnya konflik karena perbedaan perspektif dan tujuan serta kompetisi atau persaingan tetap kakan teerjadi. Adanya konflik sosial merupakan bentuk interaksi sosial yang menjadi simbol perbedaan kepentingan, kehilangan keharmonisan berpotensi akan hilang. *“the history of humankind and the rise and fall of civilizations is unquestionably a story of conflict. Conflict is inherent in human activities. It is omnipresent and foreordained.”* (Walter, 1992). Dalam menghadapi konflik, pengambilan sikap penyelesaian terjadi perbedaan, yakni sikap konstruktif dan bersikap destruktif.

Konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Konflik ini dapat juga terjadi bila dorongan, keinginan, atau keyakinan seseorang terhalangi atau bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Konflik sosial terjadi di Indonesia membangkitkan kecemasan dan ketakutan, karena konflik cenderung bersifat destruktif yang berdampak pada kesengsaraan. Kondisi tersebut merupakan ketidakmampuan

mekanisme dalam menyelesaikan masalah sosial (Rios F. d., 2011). Kegagalan musyawarah ataupun bantuan pihak ketiga (mediator atau arbitrator). Semsetinya konflik yang yang tampil dalam wujud protes sosial dan politik mampu bersifat demokratis dan kondstiktif dengan menyampaikan tuntutan secara damai dan dialogis atau resolusi.

Masyarakat Indonesia bercirikan kolektivisme dengan mengutamakan kepentingan kebersamaan dibanding kepentingan individu. Kolektivisme masyarakat cenderung mengarah pada konsensus kelompok untuk menciptakan keharmonisan dan menghindari konflik. Dalam beberapa kajian kebudayaan, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk menghindari konflik dan meskipun terjadi konflik masyarakat akan cenderung tidak dihadapi secara frontal (Syarifuddin, 2006). Sebagian besar kepatuhan atau tunduk (*submissive*) dan kompromi menjadi cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Sebagaimana bahwa pelajar Indonesia lebih cenderung menggunakan cara tunduk atau kepatuhan (*submissive*) dan kompromi dalam menyelesaikan konflik diantara mereka (Haar, 1999). Dalam konteks budaya dan tradisi masyarakat Indonesia ditemukan adanya mekanisme penyelesaian konflik sosial. Mekanisme musyawarah mufakat yang telah ada dan berkembang di sebagian besar masyarakat Indonesia dengan kekhasan lokal yang dimilikinya (Rozak, 2010).

Adanya anggapan bahwa mekanisme penyelesaian konflik secara sosial budaya dianggap lamban dan tidak lagi relevan dalam menyelesaikan konflik, sehingga cara kekerasan menjadi pilihan oleh sebagian orang maupun kelompok. Sekalipun demikian penyelesaian konflik, dengan kekerasan bukan menjadi budaya dan tatanan nilai yang diakui keberadaannya. Mengingat masyarakat Indonesia secara umumnya tetap menjunjung tinggi harmonisme (Unwanullah, 2012).

Penyelesaian konflik dengan cara kekerasan dimungkinkan oleh babarapa sebab yakni aspek kultural dengan hierarki sosial dan tuntutan masyarakat kepada elit pemerintah tidak terpenuhi. Pada aspek kultural pada umumnya masyarakat indonesia masih bersifat feodal (Tjipto, 2019). Meyakini manusia pada secara starata sosial tidak sama menurut jenjangnya dalam hierarki sosial. Komunikasi searah yang terjadi selama ini menempatkan masyarakat lapisan bawah pada sikap mendengarkan dan mengikuti perintah. Secara

kultural Indonesia memiliki masyarakat yang umumnya tidak memiliki sejarah sebagai masyarakat yang demokratis, memecahkan masalah tanpa melalui dialog. Sehingga banyak masalah dalam masyarakat yang sering diselesaikan melalui tindakan destruktif.

Aspirasi pada masyarakat lapisan bawah kepada elit penguasa tidak didengar atau dipenuhi ketika dilakukan dengan cara damai. Seringnya otoritas yang berkuasa juga memenuhi tuntutan jika dilakukan tindakan kekerasan dan mengancam. Oleh karenanya masyarakat lebih sering memperjuangkan aspirasi berhasil jika melalui jalan kekerasan daripada melalui jalan damai dan dialogis (Arifudin, 2007). Kondisi semacam ini menjadi pola untuk menyuarkan tuntutan atau aspirasi berikutnya. Akhirnya setiap tuntutan akan berhasil harus selalu melalui jalan kekerasan.

Kondisi penyelesaian konflik sosial dengan cara kekerasan tidak bisa dibiarkan lebih luas, perlu upaya strategis untuk mengatasinya secara cepat. Sehingga tidak berkembang menjadi suatu kekerasan yang merugikan yang lebih parah. Upaya penyelesaian konflik sosial menempatkan pemimpin masyarakat dan elit pemerintah sebagai mediator atau arbitrator. Mengedepankan upaya persuasif ataupun represif kepada pihak yang berkonflik. Pada sisi lain juga, adanya kesadaran untuk semestinya dapat memecahkan konflik sosial mereka sendiri secara dialogis dan konstruktif. Untuk itu, masyarakat harus mempunyai tatacara dan kemampuan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara konstruktif dengan mengadirkan kembali kebudayaan lokal yang bersifat kolektivisme dalam konteks pendidikan masyarakat secara umum (Mahiri, 2017). Akibat dari ketidakmampuan dalam memecahkan konflik secara damai, beberapa konflik sosial meningkat menjadi konflik fisik yang menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik. Konflik- konflik ini kemudian menyebabkan dampak negatif yang banyak, baik material maupun immaterial, dan baik fisik maupun psikologis bagi banyak orang.

Pendidikan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa konflik merupakan sesuatu yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda dengan kekerasan yang tidak selalu ada dalam konflik sosial. Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat tentang upaya penyelesaian konflik yang konstruktif, masyarakat Indonesia

mampu memahami, menyadari, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif tetapi juga untuk mencegah potensi konflik menjadi destruktif yang disebabkan oleh sifat klutural yang masih feodal dan tuntutan pada elit pemerintah.

Kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap konflik menimbulkan masalah psikologis, Hunt dan Metcalf (1955) dalam (Ni Putu Indra Rusminiati, 2014). Konflik dalam diri seseorang bisa terjadi bila keinginan, atau keyakinan terhalangi oleh nilai dan norma yang berkembang masyarakat. Gangguan kesehatan mental yang bersifat neurotik sebagai akibat dari ketidakmampuan mengatasi konflik dalam diri sendiri dapat terwujud dalam bentuk perilaku mengabaikan masalah, menekan masalahnya di bawah taraf kesadaran (*repression*), menarik diri dari masalah (*withdrawal*), menyalahkan pihak lain (*projection*), kembali bersifat kekanak-kanakan dalam emosi dan intelektual (*regression*), dan sakit karena gangguan *psikologis* (*psychosomatic illness*) (Capuzzi, 1997).

Pada sisi lain konflik interpersonal (*interpersonal conflict*) terjadi pada hubungan sosial antarindividu maupun antarkelompok atau dikenal konflik sosial. Konflik interpersonal atau konflik sosial ini dapat terjadi dimana saja baik dilingkungan keluarga, masyarakat, maupun aspek yang lebih besar yakni negara. konflik sosial dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok lainnya, bahkan antara negara dengan negara lainnya pada lingkup yang lebih luas.

Konflik Horizontal Mahasiswa Merupakan Fenomena Pendidikan Multikultural

Perguruan Tinggi menjadi sebagai dari sebuah sistem dan tatanan sosial semestinya memiliki susana sosial yang kondusif terhadap perkembangan dan ilmu pengetahuan, termasuk juga menjadi pusat perkembangan pandangan positif untuk mendukung proses belajar mengajar tentang resolusi konflik (Rahmad Hidayat, 2020). Sebagian besar pelajar dan mahasiswa menyenangi lingkungan kampus yang damai dan menyenangkan, hal ini dimaknai sebagai suasana ideal untuk proses belajar yang lebih baik dengan tidak ada gangguan. Resolusi konflik dan kekerasan baik aksi maupun cara pandang mahasiswa bila mana tidak di rekondisi menjadi sebuah kekuatan positif maka akan berubah menjadi iklim sosial sekolah dapat memberikan dampak negatif terhadap proses belajar mahasiswa. Perilaku destruktif menjadi aksi sosial yang menjadi pilihan yang paling menguntungkan

bagi mahasiswa bila keinginan dan cara berfikirnya tidak dikomodifikasi oleh pejabat penguasa tingkat perguruan tinggi.

Jika kita perhatikan keadaan saat ini, iklim di Perguruan Tinggi tidak selamanya damai dan aman dan terbebas dari konflik sosial. Konflik sering terjadi pula di Perguruan Tinggi apakah dalam bentuk konflik yang sederhana ataupun yang lebih serius. Konflik-konflik di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik bersifat horizontal maupun vertikal (Al-Arifin, 2012). Konflik yang bersifat horizontal misalnya konflik antarindividu mahasiswa (*interpersonal conflict*), antarkelompok mahasiswa dalam satu kampus, dan antara mahasiswa dari satu perguruan tinggi dengan mahasiswa di lain sekolah tinggi lainnya, atau antara dosen dengan dosen. Konflik yang bersifat vertikal di sekolah antara lain dapat terjadi antara mahasiswa dengan dosen, antara dosen dengan pimpinan di kampus, dan antara mahasiswa dengan pejabat di kampus. Apapun bentuknya, jika konflik hadir, maka konflik tersebut setidaknya akan mengganggu proses belajar dan kemudian akan memperlemah proses dan prestasi belajar mahasiswa.

Dari beberapa kasus konflik yang dilakukan mahasiswa di kampus ini pada umumnya bersifat horizontal, yakni antar mahasiswa sendiri. Namun konflik yang dilakukan mahasiswa yang disertai kekerasan bisa juga bersifat vertikal, misalnya konflik dan kekerasan yang terjadi antara mahasiswa dengan pihak pimpinan kampus ketika sebagian besar mahasiswa tidak setuju dengan kebijakan perguruan tinggi. Kekecewaan atau ketidaksetujuan sebagian mahasiswa kadang dilampiaskan dengan aksi menghindari konflik dengan tidak mengindahkan program dan himbuan dari perguruan tinggi.

Konflik sosial yang bersifat horizontal kadang dipicu oleh hal yang berbeda-beda, dari hal yang sepele sampai dengan hal yang lebih mendalam. Konflik ini biasanya membela teman yang mempunyai masalah pribadi, tradisi permusuhan turun-temurun di tingkat mahasiswa antara senior dan junior, dan aksi premanisme di kampus oleh mahasiswa senior kepada mahasiswa baru. Perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan mestinya mampu mengambil langkah positif terhadap konflik horizontal ini. Jika tidak kampus tidak lagi berfungsi sebagai tempat yang kondusif bagi proses belajar mahasiswa, akibatnya akan berpengaruh negatif terhadap kualitas pendidikan di kampus.

Dalam kampus pembinaan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah-masalah sosial melalui pengkajian reflektif (*reflective inquiry*) dengan cara pendidikan sosial yang berpusat pada masalah (*issue-centered education*) seperti yang dikembangkan oleh Evan, Shaver, serta Engle dan Ochoa (Evan and Saxe, 1996) (Ni Putu Indra Rusminiati, 2014). Pengkajian terhadap isi konflik sosial perlu dihadirkan dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa secara tektual mamapu menganalisis penyebab, strategi dan resolusi konflik sosial sebagai suatu yang pasitif. Perspektif kajian resolusi konflik bisa bersumber dari tatanan sosial dari masyarakat yang multi kultur untuk melihat penyebab dan resolusi konflik. Resolusi konflik yang mendidik mahasiswa untuk mampu menyelesaikan masalah konflik yang ada di masyarakat dan sekolah berada dalam lingkup *citizenship education* yang berpusat pada masalah (*issue-centered education*).

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan mengkaji isu-isu sosial warganegara yang di masukan ini masuk dalam kerangka pandangan filsafat pendidikan progresivisme yang dikembangkan oleh Dewey, serta filsafat pendidikan rekonstruksionisme sosial, yang dikembangkan oleh Brameld, Ornstein dan Levine (1985) dalam (Syaifuddin, 2006). Dalam filsafat rekonstruksionisme berpandangan bahwa pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan kesejahteraan sosial, artinya ragam ilmu-ilmu sosial diajarkan kepada mahasiswa dapat bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat. Masalah dalam masyarakat dan upaya penyelesaian masalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang jauh lebih penting dari pada sekedar pengembangan intelektualisme keilmuan (Hasan, 1996).

Pentingnya Conflict Resolution Education Di Perguruan Tinggi

Konflik sosial yang dipersepsikan dengan cara positif dan konstruktif, menjadikan konflik sosial dapat menjadi pengalaman belajar yang bermakna dari pengalaman kehidupan nyata mahasiswa dan juga dapat membantu mengembangkan *self-concept* mahasiswa. Oleh karenanya, mahasiswa mesti diberikan keterampilan dan pengetahuan, kesadaran dan sikap, serta kemampuan untuk meresolusi konflik secara positif dan konstruktif dengan tidak mekalukan aksi destruktif. Hasilnya mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan konflik mereka secara konstruktif selama di kampus dan dalam

kehidupan mereka di masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi konflik sosial. Terutama Pendidikan tinggi yang dapat mengembangkan program pengajaran yang secara mandiri melalui kurikulum kampus yang khusus dirancang untuk mendidik mahasiswa untuk hidup bersama secara damai dan untuk melatih mereka menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Seperti halnya konflik yang terjadi pada Lembaga Pendidikan tinggi, iklim di Perguruan Tinggi tidak selamanya damai dan aman. Hal ini karena konflik sering terjadi pula di Perguruan Tinggi apakah dalam bentuk konflik yang sederhana ataupun yang lebih serius. Konflik-konflik di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dalam kampus membina kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial melalui pengkajian reflektif tersebut (*reflective inquiry*) yang sejalan dengan pengajaran atau pendidikan sosial yang berpusat pada masalah dan isu sosial masyarakat. Jika konflik dipersepsi secara positif dan dipecahkan secara konstruktif, konflik kemudian dapat menjadi sarana belajar dari pengalaman kehidupan nyata dan juga dapat membantu mengembangkan self-concept mahasiswa sendiri.

Para mahasiswa mesti dididik dan dilatih dengan pengetahuan, kesadaran dan sikap, serta keterampilan untuk memecahkan konflik secara positif. Dengan demikian, dalam mencegah dan mengatasi konflik sosial, pendidikan memiliki peran penting. Pendidikan formal dapat mengembangkan program pengajaran yang secara khusus dirancang untuk mendidik para mahasiswa untuk hidup bersama secara damai dan untuk melatih mereka menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Dalam lingkup yang lebih luas antara kampus dan mahasiswa upaya untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan melalui manajemen konflik atau resolusi konflik. Manajemen konflik sering digunakan untuk mengelola atau menyelesaikan konflik-konflik sosial di masyarakat luas, konflik dalam dunia bisnis atau perusahaan, dan termasuk konflik di kampus, yang memiliki tingkat intensitas yang mendalam dan lama. Tapi untuk upaya penyelesaian konflik di dunia Pendidikan formal, para ahli dan praktisi pendidikan lebih banyak menggunakan istilah resolusi konflik atau *conflict resolution*. Dalam programnya pendidikannya sebagai program pendidikan resolusi konflik atau

conflict resolution education (Girard and Koch, 1996; Kreidler, 1997; Bodine & Crawford, 1998; Lieber, 1998;) (Jones, 2001).

Pentingnya pendidikan resolusi konflik *conflict resolution education* akan menciptakan kehidupan yang sejalan dengan salah satu pilar pendidikan atau pilar belajar yang dinyatakan oleh UNESCO (Delors, 1996), (Maftuh, 2008) yaitu *learning how to live together in harmony*. UNESCO menguraikan adanya empat pilar pendidikan atau pilar belajar, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together (learning to live with others)*, dan *learning to be*. Memakniah pendidikan sebagai *learning to live together*, berarti mahasiswa melalui proses pendidikan untuk belajar hidup berdampingan secara damai, rasa hormat dan perhatian pada orang lain. Kebutuhan belajar untuk hidup bersama secara damai sangat diperlukan saat ini, karena pada kehidupan masyarakat dunia yang penuh konflik yang menjadi tantangan.

UNESCO mempertanyakan potensi pendidikan untuk mengatasi masalah ini, dengan menyatakan bahwa, *“Education has up to now not been able to do much to alleviate that state of affairs. Is it possible to devise a form of education, which might make it possible to avoid conflicts or resolve them peacefully by developing respect for other people, their cultures and their spiritual values?”* Delors, (1996), (Maftuh, 2008). Pentingnya pendidikan untuk menuju sebuah perdamaian sesungguhnya sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1920-an oleh Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional dan merupakan pendiri Taman Siswa. Menurutnya pelaksanaan pendidikan sangat pentingnya yang didasari pada asas tertib dan damai. Ketertiban akan terwujud kalau pendidikan bersandar pada kedamaian.

Dalam konteks pendidikan dan aturan di perguruan tinggi tertib yang di maknai sebagai instrumen untuk menuju kedamaian sosial harus bebas dari paksaan dengan difasilitasi melalui metode among demokratis. Pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*) di perguruan tinggi semestinya dilakukan sejalan dengan kedudukan dan peran mahasiswa sebagai warga negara muda yang nantinya jadi warganegara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk beban besar tersebut mahasiswa mesti mampu memecahkan masalah konflik sosial yang bersifat horizontal maupun konflik vertikal.

Manakala mahasiswa tidak memiliki keterampilan dalam resolusi konflik maka pilihan mereka cenderung ke arah destruktif, dengan menimbulkan masalah sosial dan kerugian finansial. *Hildren who engage in destructive conflict strategies, particularly the use of violence, often have deficiencies in social problem-solving and interpersonal skill.* (Jones, 2001). Konflik kadang juga tidak selalu tidak memiliki fungsi yang nyata, karena ia dapat digunakan sebagai media untuk memahami masalah dan untuk mengembangkan pemecahan. Konflik dapat digunakan sebagai akar bagi perubahan pribadi dan sosial.

SIMPULAN

Konflik sosial dimaknai sebagai suatu fenomena alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sosial dan konflik sebagai bentuk interaksi sosial yang menjadi simbol perbedaan kepentingan didalamnya. Pendidikan multikultural hakikatnya merupakan strategi untuk mempersatukan perbedaan kultur bangsa yang dilakukan terencana dan sistematis dengan menitikberatkan pada perspektif pluralitas masyarakat Indonesia. Konflik sosial yang bersifat vertikal dan horizontal tampil sebagai protes sosial mampu bersifat demokratis dan konstruktif dengan menyampaikan tuntutan secara damai dan dialogis atau resolusi. Pada sisi lain Masyarakat Indonesia yang bercirikan kolektivisme dengan mengutamakan kepentingan kebersamaan dibanding kepentingan individu akan cenderung mengarah pada konsensus kelompok untuk menciptakan keharmonisan dan menghindari konflik. Dalam konteks budaya dan tradisi masyarakat ini ditemukan adanya mekanisme penyelesaian konflik sosial. Perguruan Tinggi menjadi sebuah sistem dan tatanan sosial yang kondusif terhadap perkembangan dan ilmu pengetahuan, termasuk juga menjadi pusat perkembangan pandangan positif untuk mendukung proses pendidikan resolusi konflik dengan menggali nilai budaya dan pluralisme masyarakat. Melalui pengalaman belajar yang bermakna dari pengalaman kehidupan nyata mahasiswa dan juga dapat membantu mengembangkan *self-concept* mahasiswa. Oleh karenanya, mahasiswa mesti diberikan keterampilan dan pengetahuan, kesadaran dan sikap, serta kemampuan untuk meresolusi konflik secara positif dan konstruktif dengan tidak melakukan aksi destruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arifin, A. H. (2012). Implementasi pendidikan multikultural dalam praksis pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol 1. No 1.
- Arifudin, I. (2007). Urgensi implementasi pendidikan multikultural di sekolah. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol. 12, No. 2.
- Capuzzi, D. &. (1997). *Introduction to The Counseling Profession. Second Edition*. . Boston: Allyn and Bacon.
- Gollnick, D. &. (2017). *Multicultural Education in A Pluralistic Society, Tenth Edition*. USA: Pearson Education, Inc.
- Hanum, F. &. (2013). Pengembangan model pembelajaran multikultural terintegrasi mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, , Vol 6. No. 2.
- Hasan, H. S. (1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. . Jakarta: Depdikbud.
- Jones, T. S. (2001). *School Conflict Management: Evaluating Your Conflict Resolution Education Program*. Ohio: Ohio Commission on Dispute Resolution & Conflict Management.
- Maftuh, B. (2008). *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik secara Damai*. . Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UPI.
- Mahiri, J. (2017). Introduction: multicultural education and micro-cultural youth. . *Multicultural Education Review*, , Vol. 9, No.2 .
- Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Ni Putu Indra Rusminiati, d. (2014). Model Pembelajaran Resolusi Konflik Berbasis Masalah . *e-Journal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha*, 30-45.
- Rahmad Hidayat, d. (2020). Pendidikan Resolusi Konflik Melalui Pembelajaran Multikultural . *B u a n a I l m u*, 24-35.
- Rios, F. &. (2011). Multicultural education as a human right: Framing multicultural education for citizenship in a global age. *Multicultural Education Review*, Vol 3, No.
- Rozak, A. (2010). *Pendidikan Kewargaan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Santrock, J. (2014). *Psikologi Pendidikan (Educational Psychology), Edisi 5 Buku 1. Terjemahan Harya* . Jakarta: Salemba Humanika.
- Shen, S. (2019). Teaching ‘multiculturally’: geography as a basis for multicultural education in Korea. . *Multicultural Education Review*, 37-58.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Syaifuddin, A. F. (2006). Membumikan multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*, Vol. 2, No. 1.
- Tjipto, S. &. (2019). Constraints in the meanings of lay theories of culture in a culturally homogeneous society: A mixed-methods study on multiculturalism and polyculturalism in Wonosobo, Indonesia. . *Cogent Psychology*, Vol. 6, No. 1.
- Unwanullah, A. (2012). Tranformasi Pendidikan untuk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural. *Jurnal Pembangunan Pendidikan. Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 1, No. 1.
- Walter. (1992). *Principles of Instructional Design*. USA: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Wilhelm, R. W. (1998). *Issues in multicultural education. Curriculum journal*, Vol. 9, No. 2.
- Woolfolk, A. (2009). *Educational Psychology Active Learning*. Boston: Pearson Education.